



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

EVALUASI PROGRAM KEMENDIKBUDRISTEK

Yulia Indahri
Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek pada tanggal 15 Desember 2022 telah menyampaikan laporan hasil evaluasi dari 9 program prioritas Kemendikbudristek kepada Ketua Komisi X DPR RI. Laporan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada program-program yang dilaksanakan di tahun 2022. Program-program yang dievaluasi dalam laporan tersebut adalah: (1) Platform Digital Pendidikan; (2) Kurikulum Merdeka; (3) Asesmen Nasional; (4) Guru Penggerak; (5) Sekolah Penggerak; (6) Merdeka Belajar Kampus Merdeka; (7) Literasi; (8) Tiga Dosa Pendidikan; dan (9) BLU Museum Nasional.

Praktisi, pakar, dan pengamat pendidikan menyampaikan beberapa catatan yang salah satunya menyatakan bahwa laporan evaluasi program tidak mencantumkan besaran anggaran yang telah digunakan. Hal tersebut sangat disayangkan karena dana pendidikan yang besar seharusnya dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Pemanfaatan dana tersebut kemudian perlu dilaporkan kepada DPR yang salah satu fungsinya adalah di bidang anggaran.

Pakar pendidikan menyampaikan catatan yang menyatakan bahwa evaluasi hanya menekankan pada target jumlah sasaran yang dicapai oleh program, tanpa adanya hitungan kualitas yang seharusnya tercermin dalam laporan. Selain itu, evaluasi hanya menggunakan sampel dari tiga provinsi dengan 18 kabupaten/kota, yang kurang mewakili keragaman karakteristik dari satuan pendidikan formal dan nonformal di seluruh Indonesia. Evaluasi program platform digital pendidikan juga tidak melaporkan kondisi pendidikan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Catatan lain dari pengamat pendidikan adalah tidak terlihat jelasnya dampak dari program yang dilaporkan terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022–2024. Seharusnya, kementerian berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN dan juga dalam Rencana Strategis yang telah disusun di masing-masing kementerian.

Pakar evaluasi pendidikan menyatakan bahwa laporan yang diterima tidak dapat dianggap sebagai evaluasi yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai paparan dari fakta yang ditemukan. Seharusnya, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program, ada etika yang perlu dipatuhi. Evaluasi tidak boleh dilakukan oleh pelaksana program itu sendiri. Hal ini dikarenakan bias evaluasi akan sangat tinggi jika program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dievaluasi juga oleh Kemendikbudristek.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa laporan evaluasi tersebut tidak mencakup validasi terhadap praktik-praktik baik yang dilaporkan. Validasi merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa proses yang dilalui sudah benar dan hasil yang didapat juga baik

Beberapa praktisi pendidikan menyampaikan kekhawatiran terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena dirasakan makna “belajar” di dalam program tersebut dibatasi secara pragmatis menjadi “berlatih bekerja” di lingkungan kerja. Kekhawatiran juga muncul bahwa kompleksitas dalam menyelenggarakan Kampus Merdeka dapat menyebabkan kehancuran dalam praktik pendidikan nasional. Meskipun program ini memiliki itikad untuk mengasah kemampuan, minat, bakat, dan peluang jejaring mahasiswa ke program studi lain dan mengeksplorasi keilmuan di lapangan, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kurikulum perguruan tinggi yang ada.

Atensi DPR

Laporan yang disampaikan khusus karena ada keinginan dari Anggota Komisi X untuk lebih memahami kinerja kementerian yang menjadi mitra kerjanya, perlu dikritisi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Masukan terhadap laporan diharapkan dapat memotivasi kementerian untuk bersama-sama dengan DPR mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk laporan evaluasi program ke depan, perlu dipertimbangkan untuk:

- menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai pedoman;
- mencantumkan evaluasi anggaran yang benar-benar mendukung pemanfaatan uang negara untuk pemulihan ekonomi nasional;
- menyertakan evaluasi terhadap jalur pendidikan nonformal;
- mengupayakan evaluasi kualitas;
- menggunakan sampel yang lebih representatif; dan
- melakukan validasi terhadap praktik baik yang sudah dilaporkan.

Sumber

Kompas, 10 dan 16 Januari 2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.